



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132
Laman : www.dikpora.jogjaprov.go.id Email: dikpora@jogjaprov.go.id

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 871 Tahun 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 harus diwujudkan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah yang satu ke sekolah/madrasah yang lain pada jenjang yang sama.
3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
4. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB/SKYBS adalah surat

pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.

5. Dinas DIY adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dapat mencakup: Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik Negeri maupun Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan menengah atau pendidikan khusus sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus berazaskan:

- a. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini.
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan.
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik SMA

- a. Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat.
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2017/2018.

- (2) Persyaratan calon peserta didik SMK
- a. Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat.
 - b. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2017/2018.
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/ kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Persyaratan calon peserta didik SLB
- a. TKLB : anak berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
 - b. SDLB : anak telah berusia 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
 - c. SMPLB : memiliki ijazah/STTB/SKYBS SDLB, SD/MI Inklusi.
 - d. SMALB : memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMPLB/SMP Inklusi.

B A B IV
JUMLAH
PESERTA DIDIK TIAP ROMBONGAN BELAJAR/KELAS
Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
- a. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
 - b. SMK paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
 - c. SLB :
 - 1) TKLB paling banyak 5 (lima);
 - 2) SDLB paling banyak 5 (lima);
 - 3) SMPLB paling banyak 8 (delapan);
 - 4) SMALB paling banyak 8 (delapan).
- (2) Jumlah rombongan belajar keseluruhan tiap SMA/SMK diatur sebagai berikut :
- a. SMA paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak banyak 36 (tiga puluh enam), masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas);
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak banyak 72 (tujuh puluh dua), masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat);
- (3) SMA dan SMK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus maksimal 4 anak setiap rombongan belajar/kelas.

B A B V
JALUR PENDAFTARAN
Pasal 6

- (1) Jalur regular : penerimaan peserta didik baru yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik yang akan melanjutkan atau mengikuti pendidikan di SMA, SMK, atau SLB.
- (2) Jalur Kelas Khusus Olahraga : penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki minat/ bakat di bidang olahraga atau memiliki prestasi/ kejuaraan di bidang olahraga.
- (3) Jalur Sekolah Seni : penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki minat di bidang seni atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang seni.

B A B VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 7

Pengelolaan PPDB dilakukan dengan tahapan :

- a. publikasi ke masyarakat;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

Pasal 8

- (1) Sekolah mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat a. dilakukan dengan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, papan pengumuman, maupun media lainnya.
- (2) Sekolah menetapkan dan mempublikasi daya tampung calon peserta didik yang diterima.
- (3) Khusus bagi SLB, dalam rangka menetapkan daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) sekolah melakukan analisis kemampuan layanan pendidikan sebagai dasar penghitungan jumlah peserta didik yang akan diterima pada awal tahun pelajaran yang mendasarkan pada ketersediaan guru, jenis hambatan/ketunaan, sarana dan prasarana dan pertimbangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat b. dilakukan di sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sekolah wajib menyediakan formulir :
 - a. pendaftaran calon Peserta Didik Baru;
 - b. pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dan;
 - c. formulir pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat c. dilakukan
 - a. Seleksi calon Peserta Didik Baru Kelas 10 SMA dilaksanakan menggunakan nilai SHUN/ SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat dan dapat mempertimbangkan prestasi nonakademik serta pertimbangan zonasi.
 - b. Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 10 SMK dilaksanakan menggunakan nilai SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat dan dapat mempertimbangkan bakat serta kemampuan peserta didik sesuai bidang/program keahlian, prestasi non akademik serta pertimbangan zonasi.
 - c. Seleksi calon Peserta Didik Baru pada SLB:
 - 1) Berbasis pada tempat tinggal;
 - 2) Dapat melalui tes psikologi yang relevan;
 - 3) Apabila sekolah terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;
 - 4) Seleksi pada SDLB tidak diharuskan telah mengikuti TK/RA/TKLB;
 - 5) Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 23 tahun.

Pasal 11

- (1) Pengumuman hasil seleksi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat c. dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Bagi sekolah yang belum terpenuhi dayaampungnya masih dapat menerima peserta didik baru paling akhir sampai tanggal 30 September tahun yang bersangkutan.**

Pasal 12

- (1) Pendaftaran ulang Peserta Didik Baru yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat e. dilakukan di sekolah pendaftar diterima.
- (2) Pada waktu pelaksanaan daftar ulang calon peserta yang diterima wajib menyerahkan :
 - a. bukti pendaftaran.
 - b. surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah dan apabila melakukan tindakan kriminal maka peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua.

Pasal 13

- (1) Jawal pelaksanaan PPDB Jalur Reguler
 - a. SMA Negeri dan SMK Negeri
 - 1) Pendaftaran
 - a) Hari : Rabu s.d. Jum'at
 - b) Tanggal : 5 s.d. 7 Juli 2017

- 2) Teknis pelaksanaan:
 - Menggunakan Sistem Online yang diatur dengan Petunjuk Teknis tersendiri.
 - b. SMA Swasta dan SMK Swasta
 - 1) Pendaftaran
 - a) Hari : Rabu s.d. Senin
 - b) Tanggal : 5 s.d. 11 Juli 2017
 - 2) Seleksi : Senin, 11 Juli 2017
 - 3) Pengumuman : Selasa, 12 Juli 2017
 - 4) Daftar Ulang : Selasa s.d. Rabu, 12 s.d. 13 Juli 2017
 - 5) Teknis pelaksanaan : diatur oleh masing-masing sekolah.
 - c. SLB Negeri dan Swasta
 - 1) Pendaftaran
 - 2) Hari : Rabu s.d. Senin
 - 3) Tanggal : 5 s.d. 11 Juli 2017
 - 4) Seleksi : Senin, 11 Juli 2017
 - 5) Pengumuman : Selasa, 12 Juli 2017
 - 6) Daftar Ulang : Selasa s.d. Rabu, 12 s.d. 13 Juli 2017
 - 7) Teknis pelaksanaan : diatur oleh masing-masing sekolah.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB Jalur Kelas Khusus Olahraga (8 SMA Negeri)
- a. Pendaftaran
 - 1) Hari : Senin s.d. Rabu
 - 2) Tanggal : 8 s.d. 10 Mei 2017
 - b. Teknis pelaksanaan :
 - Diatur dengan Petunjuk Teknis tersendiri yang menyatu dengan Pertunjuk Teknis PPDB Sistem Online.
- (3) Jalur Sekolah Seni (SMK 1 Kasihan, SMK 2 Kasihan, SMK 3 Kasihan)
- a. Pendaftaran
 - 1) Hari : Senin s.d. Sabtu (hari kerja)
 - 2) Tanggal : 8 s.d. 13 Mei 2017
 - b. Teknis pelaksanaan :
 - Diatur dengan Petunjuk Teknis tersendiri yang menyatu dengan Pertunjuk Teknis PPDB Sistem Online.

B A B VII
HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Hari pertama masuk sekolah ditetapkan Senin, 17 Juli 2017
- (2) Selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas 10 SMA/SMK, dan kelas 1 SDLB, kelas 7 SMPLB, kelas 10 SMALB diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.

- (3) Dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) sekolah agar menambahkan materi tentang Budaya Yogyakarta.
- (4) Bagi peserta didik kelas 2 sampai dengan kelas 6 SDLB, kelas 8 dan 9 SMPLB, serta kelas 11, 12 SMA, SMK, dan SMALB, pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

BAB VIII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB;
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan harus menunjukkan/ melengkapi Surat Pindah Tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI harus melengkapi fotokopy kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas DIY, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) dan mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya;
 - f. Perpindahan peserta didik pada kelas 1, 7 dan 10 pelaksanaannya setelah Semester 1.
- (3) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima hanya pada perpindahan kelas kelas 11, 12 SMA/SMK dan selama daya tampung belum mencapai batas maksimal, serta nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas minimal penerimaan tahun yang bersangkutan;

- (4) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK tetapi tidak pada awal kelas 10 dengan catatan :
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (5) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (6) Perpindahan peserta didik di SLB :
 - a. Perpindahan peserta didik antar SLB di DIY harus dengan didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas DIY;
 - b. Perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas DIY;
 - c. Perpindahan peserta didik SLB dari luar DIY harus didukung dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas DIY;
 - d. Jika terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dan masuk daftar tunggu dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya;
- (7) Sekolah wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB IX

BIAYA

Pasal 16

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah bersumber dari BOS/BOSDA/DPA.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon Peserta Didik Baru, kecuali pada Jalur Kelas Khusus Olahraga dan Jalur Sekolah Seni untuk biaya tes bakat olahraga atau tes bakat seni.
- (3) Perpindahan peserta didik ke sekolah negeri tidak boleh dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB X

LAIN – LAIN

Pasal 17

- (1) Sekolah harus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran Baru sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

- (3) Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pakaian seragam sekolah meliputi pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan, pakaian seragam khas sekolah, dan pakaian tradisional;
 - b. Pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
 - c. Bagi peserta didik yang orang tua/walinya mengalami hambatan ekonomi atau keadaan khusus, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau kepala sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
 - d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Sekolah wajib memberikan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kelancaran dan peningkatan kualitas dari waktu ke waktu.
- (2) Pelaporan PPDB dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah sampai dengan Dinas DIY;
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://dikpora.jogjaprovo.go.id>

BAB XII
SANKSI
Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Personil sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi teguran lisan;
 - b. Personil sekolah yang tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a. dikenakan sanksi teguran tertulis;
 - c. Personil sekolah yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b. dikenakan sanksi penundaan/pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah dapat dikenakan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) SMA wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar untuk kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas) paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) SMK wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar untuk kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas) paling lama 3 (tiga) tahun;

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Mei 2017


KEPALA

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010

TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
5. Bupati/Walikota di DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se-DIY;
7. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD Dinas Dikpora DIY;
8. Kepala SMA/SMK/SLB se-DIY.